

**PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
PEKANBARU-KANDIS-DUMAI DI ATAS TANAH KONSESI USAHA HULU
MIGAS DI PROVINSI RIAU**

T E S I S

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Studi Magister Kenotariatan



Oleh

MONIKA FATMAWATI BAGUS

NIM. 1620123037

Dosen Pembimbing

Dr. YUSLIM, S.H.,M.H
Dr. ZEFRIZAL NURDIN, SH.MH

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCA SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PEKANBARU-KANDIS-DUMAI DI ATAS TANAH KONSESI USAHA HULU MIGAS DI PROVINSI RIAU
(MONIKA FATMAWATI BAGUS, NIM : 1620123037, 107 Halaman, Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Andalas Padang, 2020)

ABSTRAK

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan menyediakan tanah untuk kepentingan masyarakat/umum bagi pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di Pulau Sumatera yang sangat strategis. Pergerakan barang dan jasa sangat mempengaruhi besaran lalu lintas di provinsi tersebut terutama di Kota Pekanbaru dan Dumai. Untuk mengatasi dan mempercepat pergerakan barang dan jasa perlu adanya akses yang bisa mengantisipasi beban lalu lintas. Salah satu alternatif penyelesaian adalah dengan membangun ruas Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai yang menghubungkan pergerakan dari Pekanbaru menuju Dumai. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pembebasan tanah, Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Tanah menemui kendala dalam pemberian ganti rugi karena tanah/lahan yang dimiliki tersebut adalah tanah/lahan konsesi PT. Chevron Pasific Indonesia yang tercatat sebagai aset Barang Milik Negara, sehingga pihak yang melepaskan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Tanah Barang Milik Negara dan telah diajukan ke Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dialih fungsikan bagi penggunaan jalan Tol oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Metode yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah dan hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan penyelesaian masalah Pengadaan Tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu melakukan penelitian dengan penekanan penerapan payung hukum pengadaan tanah berupa UU, PP, Permen, Perkab dan peraturan lainnya tentang Pengadaan Tanah. Data yang dikumpulkan berupa data primer, diperoleh dari pihak terkait dalam Pengadaan Tanah dilokasi penelitian, data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum linier.

Dari penelitian diperoleh bahwa Pihak pemegang konsesi PT. Caltex Pasific Indonesia (PT.CPI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau di Tanjung Pinang tanggal 5 Juni 1959 Nomor : 091/48/59. Status tanah seperti konsesi ini harus dilakukan konversinya oleh pemegang konsesi menjadi Hak Atas Tanah sesuai ketentuan-ketentuan konversi yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal IV. Namun berdasarkan surat DJKN No. S-884/KN.4/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Keterangan Barang Milik Negara, tanah tersebut telah tercatat sebagai Barang Milik Negara.

Kata kunci: Pengadaan Tanah, Barang Milik Negara dan Jalan Tol

**PROCUREMENT OF LAND FOR THE DEVELOPMENT OF PEKANBARU-KANDIS-DUMAI TOLL ROAD ON THE LAND OF OIL AND GULTA BUSINESS CONCESSION
IN RIAU PROVINCE**

(MONIKA FATMAWATI BAGUS, NIM: 1620123037, 107 pages, Notary Masters Study Program, Andalas University, Padang, 2020)

ABSTRACT

National development is an effort to improve all aspects of the life of the people, nation and state. Land Procurement for public interest is an activity of providing land for public / public interests for the implementation of development projects carried out by the government or agencies that require land. Riau Province is one of the provinces in Sumatra which is very strategic. The movement of goods and services greatly affects the amount of traffic in the province, especially in the cities of Pekanbaru and Dumai. To overcome and accelerate the movement of goods and services, access is needed to anticipate traffic burdens. One alternative solution is to build the Pekanbaru-Kandis-Dumai Toll Road that connects the movement from Pekanbaru to Dumai. There are problems in the implementation of land acquisition, Commitment Making Officers and the Land Acquisition Committee encounter obstacles in providing compensation because the land / land owned is the land / concession area of PT. Chevron Pacific Indonesia is listed as an asset of the State Property, so the releasing party is the Directorate General of State Assets. The State Property and has been submitted to the Ministry of Finance the Director General of State Assets to be transferred for use of the toll road by the Ministry of Public Works and Public Housing.

The method used is analytical descriptive, which reveals laws and regulations relating to Land Acquisition and law in its implementation in the community regarding the resolution of the Land Acquisition problem. This research uses an empirical juridical approach that is conducting research with emphasis on the application of paying land acquisition law in the form of laws, PPs, Permen, Perkaban and other regulations on Land Procurement. Data collected in the form of primary data, obtained from relevant parties in the Land Acquisition in the research location, secondary data obtained from secondary legal materials, primary legal materials and linear legal materials.

From the research it was found that the concessionaire PT. Caltex Pacific Indonesia (PT.CPI) based on Decree of the Head of the Riau Level I Swatantra Region in Tanjung Pinang dated June 5, 1959 Number: 091/48/59. The status of land such as the concession must be converted by the concession holder into a Land Right in accordance with the conversion provisions regulated in the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Rules Article IV. But based on DJKN letter No. S-884 / KN.4 / 2017 dated November 7, 2017 concerning the Statement of State Property, the land has been registered as State Property.

Keywords: Land Procurement, State Property and Toll Roads